



Efektivitas Kegiatan Sitapa (Sigap Tata Praja) Pendidikan Dalam Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Untuk Meminimalisir Kenakalan Remaja di Provinsi Jawa Timur

Ayu Arfina

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: ayuaafi22@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 17, 2025

Revised March 15, 2025

Accepted April 23, 2025

Available online May 11, 2025

Kata Kunci:

Sitapa Pendidikan; Satpol PP Provinsi Jawa Timur; Penegakan Perda

Keywords:

Sitapa Education; East Java Province

Satpol PP; Enforcement of Regional

Regulations



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi pelanggaran peraturan daerah, khususnya di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kenakalan remaja yang meningkat, khususnya berfokus pada siswa SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur. Melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, inisiatif ini berupaya meningkatkan disiplin siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sekaligus mendidik siswa tentang risiko yang terkait dengan perilaku nakal atau negatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya menegakkan peraturan untuk meningkatkan ketertiban umum dan kesadaran masyarakat utamanya pada masyarakat yang sadar akan hukum. Temuan ini mengungkapkan bahwa kegiatan sitapa pendidikan telah berhasil mengidentifikasi dan mengatasi masalah seperti bolos sekolah yang didefinisikan sebagai siswa meninggalkan sekolah tanpa izin. Studi ini menekankan perlunya pendekatan persuasif yang mencakup langkah-langkah pencegahan dan keterlibatan masyarakat untuk secara efektif mengurangi pelanggaran disiplin di antara siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana meninjau dari studi kasus. Peneliti secara langsung

terjun ke lapangan serta wawancara kepada aparat terkait.

ABSTRACT

This research investigates the effectiveness of activities carried out by the East Java Province Civil Service Police Unit (Satpol PP) in dealing with violations of regional regulations, especially in the education sector. This program aims to overcome the increasing problem of juvenile delinquency, especially focusing on high school/vocational school students in East Java Province. Through collaboration with the East Java Provincial Education Office, this initiative seeks to improve student discipline and create a conducive learning environment while educating students about the risks associated with naughty or negative behavior. This research highlights the importance of enforcing regulations to improve public order and public awareness, especially among people who are aware of the law. These findings reveal that educational sitapa activities have succeeded in identifying and overcoming problems such as school truancy, defined as students leaving school without permission. This study emphasizes the need for a persuasive approach that includes preventive measures and community involvement to effectively reduce student disciplinary infractions. This research uses a qualitative approach which reviews case studies. Researchers went directly into the field and interviewed relevant officials.

1. PENDAHULUAN

Fenomena kenakalan remaja saat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia terutama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Menurut ahli, Hurlock (1973) mengemukakan bahwa kenakalan remaja merupakan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja dan perilaku tersebut bisa membuat seseorang individu yang melakukannya mendapatkan hukuman atau sanksi. Beberapa kenakalan remaja yang sedang marak saat ini adalah seperti siswa bolos sekolah, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, tawuran, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja ini bisa disebabkan dari beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pendidikan dan edukasi kepada remaja atau pelajar, lingkungan yang kurang baik, dan juga kurangnya peran orang tua di rumah (Rudi & Syukur, 2021).

Untuk menindaklanjuti masalah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur membentuk program kegiatan dalam rangka menindaklanjuti fenomena kenakalan remaja yang ada di Provinsi Jawa Timur khususnya untuk memberikan edukasi dan pembinaan terhadap pelajar SMA/SMK. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin siswa sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif serta memberikan pemahaman terhadap risiko kenakalan remaja. Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertugas melakukan pengawasan, edukasi serta penertiban atau tindakan terhadap siswa yang ditemukan berada di luar lingkungan sekolah pada jam belajar serta memberikan edukasi tentang penegakan peraturan daerah dan kenakalan remaja. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi angka pelanggaran disiplin di kalangan pelajar dan mendorong mereka untuk memanfaatkan waktu sekolah secara optimal. Program ini juga melibatkan koordinasi dengan pihak sekolah dan orang tua untuk memastikan keberlanjutan dari proses pembinaan. Diharapkan, melalui kerja sama ini, siswa dapat lebih memahami pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap pendidikan mereka.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur yang bertugas melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) dan memberikan pelayanan publik tidak bersifat dualitas dan tidak selalu menggunakan kekuatan fisik dalam berinteraksi dengan masyarakat (Indrawati, 2023). Untuk memastikan peraturan ditegakkan dan pemerintah daerah pada akhirnya dapat menjadi alat utama agar tercipta ketentraman, kenyamanan, ketertiban, dan kesadaran masyarakat. Aparat Satpol PP Provinsi Jawa Timur perlu bersikap tegas namun tetap bijaksana dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus lebih mengutamakan tindakan pengendalian dan pencegahan dengan cara berkomunikasi yang persuasif dan humanis, daripada menggunakan kekerasan. Pendekatan ini akan membantu menghindari konflik serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. (Soetarto et al., 2021).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 225, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menegakkan Perda / Perkada dan menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu komponen penegak yang sangat penting.

Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan moral, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. kemampuan yang terpuji dan hakiki bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf h tentang Penanganan Gangguan Trantibum dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib dalam bidang pendidikan yang ada pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sebagaimana diubah menjadi Peraturan Dearah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penanganan gangguan trantibum dalam rangka memelihara, menciptakan kondisi tenteram dan tertib serta berkewajiban memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat, stakeholder dan pelajar .

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan penegakan peraturan daerah serta ketentraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur akan melaksanakan kegiatan Operasi Sigap Tata Praja (SITAPA) Penegakan Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan, adapun hasil dari koordinasi tersebut bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah sepakat dan mendukung akan melaksanakan kegiatan tertib pendidikan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang berlaku, bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah melakukan operasi Penegakan Perda dan kepatuhan kepada pelajar SMA/SMK yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib pendidikan melalui pemberian wawasan dan edukasi terhadap pelajar SMA/SMK.

Penelitian ini mengkaji dari kasus siswa melanggar tertib pendidikan di lima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dari program penertipan SITAPA Pendidikan, ditemukan siswa yang melanggar tertib pendidikan dari beberapa asal sekolah. Adapun data ini di ambil dari website linktree Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Perilaku membolos sekolah bisa didefinisikan sebagai siswa yang tidak masuk sekolah atau keluar sekolah tanpa adanya izin yang tertulis maupun lisan serta tidak adanya alasan yang jelas (Sari & Muis, 2018).

Tabel 1.1 Tabel Jumlah Siswa yang Terjaring Pada Program SITAPA Pendidikan tahun 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Asal Sekolah	Jumlah siswa	Sumber data pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Kediri	SMA 1 Kota Kediri	1 orang	https://tr.ee/y2rTepdNyf
		SMAN 3 Kota Kediri	1 orang	
		SMKN 1	2 orang	

		Kediri		
		SMA Wahidiyah	1 orang	
		SMK PGRI 1 Kediri	2 orang	
2	Kabupaten Madiun	SMKN 1 Wonosari	6 orang	https://tr.ee/zXn47maoHF
		SMKN 1 Sarirejo	2 orang	
3	Kabupaten Lamongan	SMKN 1 Sarirejo	2 orang	https://tr.ee/YCSpdvox2V
		MA Sains Roudlotul Qur'an	1 orang	
		SMKN 2 Lamongan	11 orang	
4	Kabupaten Mojokerto	SMK Raden Patah Mojokerto	6 orang	
		SMA Diponegoro	1 orang	
		SMKN 1 Jatirejo	1 orang	
		SMK Asyifah	2 orang	
5	Kabupaten Bangkalan	SMKN 1 Bangkalan	2 orang	https://tr.ee/beAzwl8Sw9

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimana meninjau dari studi kasus. Peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan fakta, kemudian data dan fakta yang didapat akan diolah menjadi informasi yang berguna. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur terkait kegiatan yang telah dilakukan berupa penertiban siswa bolos sekolah dan sosialisasi kepada beberapa sekolah tertuju.

Penulis juga menggunakan pendekatan induktif untuk sampai pada suatu kesimpulan dengan mengumpulkan informasi dan fakta, kemudian mengevaluasi dan menyusun temuan-temuan pengamatan unik tersebut untuk menciptakan suatu hasil yang sambung-menyambung dan berkaitan satu sama lain guna merumuskan suatu argumen umum (Hibatullah, 2023)

Penelitian ini mengumpulkan data melalui tiga metode utama. Pertama, observasi, di mana peneliti yang juga merupakan mahasiswi magang ikut serta dalam berbagai kegiatan di kantor. Selama observasi, peneliti mengamati secara

langsung kebiasaan, budaya kerja, serta karakter pegawai Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Observasi ini dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan fenomena yang terjadi di lapangan. Kedua, wawancara, yang dilakukan dengan metode semi-terstruktur. Dalam wawancara ini, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tema penelitian, khususnya mengenai pelaksanaan kegiatan SITAPA Pendidikan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan bukti dari kegiatan di lapangan. Dokumentasi ini mencakup berbagai catatan dan laporan kinerja yang memperkuat hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program SITAPA Pendidikan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Timur

SITAPA Pendidikan merupakan kata kunci yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kepatuhan tata tertib Pendidikan kepada siswa/siswi SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya SITAPA Pendidikan dilaksanakan dengan dua cara yaitu, operasi gabungan dan juga sosialisasi di beberapa sekolah SMA/SMK yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dua cara tersebut bermanfaat untuk memberikan wawasan dan edukasi terhadap siswa/siswi SMA/SMK tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah khususnya dalam hal tertib pendidikan dan melaksanakan operasi gabungan Bidang Pendidikan dalam rangka penegakan kepatuhan Perda dan Perkada guna menekan kenakalan remaja diluar jam sekolah.

a. Kegiatan Sosialisasi di beberapa sekolah SMA/SMK Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2024 terdapat beberapa sekolah yang sudah dilakukan sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur tentang kenakalan remaja. Beberapa sekolah tersebut adalah SMAN 12 Surabaya, SMAN 7 Surabaya, SMKN 3 Surabaya, SMKN 10 Surabaya, dan SMAN 1 Taman Sidoarjo. Dalam sosialisasi tersebut siswa/i diberikan edukasi tentang kenakalan remaja serta memperkenalkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas untuk penegakan peraturan daerah khususnya bidang pendidikan. Kegiatan ini mendapat tanggapan yang positif oleh pihak sekolah. Karena dengan adanya program SITAPA Pendidikan ini bisa membantu sekolah-sekolah yang ada di kota/kab Jawa Timur untuk mengontrol dan memberikan arahan serta bimbingan kepada siswa/siswi agar tetap mematuhi aturan Pendidikan yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.2 Tabel Data Sekolah yang sudah dilaksanakan Sosialisasi SITAPA Pendidikan

No.	Nama sekolah	Tanggal kegiatan	Sumber data pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SMAN 12 Surabaya	12 Agustus 2024	https://tr.ee/tsO0wl09S-
2	SMAN 7 Surabaya	13 Agustus 2024	https://tr.ee/gBoRS6B9vU
3	SMKN 3 Surabaya	19 Agustus 2024	https://tr.ee/RIZA7_LUa
4	SMKN 10 Surabaya	19 Agustus 2024	https://tr.ee/4_BaW698oz
5	SMAN 1 Taman Sidoarjo	27 Agustus 2024	https://tr.ee/Y6Kx6aX1Qq

b. Kegiatan Operasi Gabungan SITAPA Pendidikan

Operasi gabungan SITAPA Pendidikan dibentuk untuk melakukan pemantauan langsung di luar sekolah. Kegiatan ini menargetkan siswa/siswi yang melakukan pelanggaran seperti bolos sekolah. Dalam kegiatan operasi gabungan yang dilakukan ditemukan masih banyak siswa/siswi yang bolos sekolah saat jam sekolah masih berjalan. Pada tahun 2023 dilakukan operasi gabungan di empat kota/kab Provinsi Jawa Timur, dan memberikan hasil sebagai berikut:

- a) Di Kabupaten Sidoarjo dan Mojokerto terjaring sebanyak 13 siswa dan 2 siswi yang bolos sekolah. Operasi dilakukan pada tanggal 7-8 Desember 2023
- b) Di Kabupaten Tuban terjaring sebanyak 9 siswa dan 7 siswi yang bolos sekolah. Operasi dilakukan pada tanggal 11-12 Desember 2023
- c) Di Kabupaten Tulungagung terjaring sebanyak 39 siswi yang bolos sekolah. Operasi dilakukan pada tanggal 14-15 Desember 2023

Dengan banyaknya siswa/siswi yang terjaring dalam operasi gabungan SITAPA Pendidikan pada akhir tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur melanjutkan kegiatan operasi gabungan ini pada tahun 2024. Dalam tahun 2024 ditemukan beberapa siswa/siswi yang masih bolos sekolah seperti pada tabel 1.1 yang sudah tertera. Dengan hasil rincian sebagai berikut:

- a. Di Kota Kediri terjaring sebanyak 7 siswa yang bolos sekolah. Operasi dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024
- b. Di Kabupaten Madiun terjaring sebanyak 6 siswa yang bolos sekolah. Operasi dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2024
- c. Di Kabupaten Lamongan terjaring sebanyak 14 siswa yang bolos sekolah. Operasi dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2024
- d. Di Kabupaten Mojokerto terjaring sebanyak 14 siswa yang bolos sekolah. Operasi dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2024
- e. Di Kabupaten Bangkalan terjaring sebanyak 2 siswa yang bolos sekolah. Operasi dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2024

Faktor Pendukung Efektivitas SITAPA Pendidikan

Dalam pelaksanaan program penanganan pelanggaran peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban umum pada bidang pendidikan tentunya juga memiliki faktor pendukung agar tercipta kelancaran program tersebut. Beberapa faktor ini sebagai berikut:

a. Faktor internal

Dalam menjalankan program penanganan pelanggaran peraturan daerah di bidang pendidikan, Satpol PP Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Upaya menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan pendidikan diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf (h), sementara aturan mengenai larangan bagi siswa atau kelompok siswa tercantum dalam Pasal 14 Ayat 1.

b. Faktor eksternal

Faktor luar yang menjadi pendukung untuk terjalannya SITAPA Pendidikan adalah dengan adanya laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur terkait tata tertib sekolah yang banyak dilanggar oleh siswa atau siswi SMA/SMK serta maraknya fenomena kenakalan remaja. Hal ini disampaikan oleh Staff Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur bidang penegakan peraturan daerah kepada peneliti. Oleh karena itu, kerja sama antara perangkat daerah lain juga sangat membantu kegiatan SITAPA Pendidikan. Perangkat Daerah yang dimaksud seperti Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan SITAPA (Sigap Tata Praja) Pendidikan menjadi salah satu cara tepat dalam menangani pelanggaran peraturan daerah terutama pada bidang Pendidikan. Langkah ini diharapkan bisa menjadi awal yang baik untuk kesadaran para pelajar agar tetap mematuhi aturan yang berlaku. Kegiatan Sitapa Pendidikan mengedepankan pendekatan preventif dan edukatif dengan memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya mematuhi aturan yang ditetapkan. Melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti penyuluhan, razia, pendampingan, dan penegakan aturan secara persuasif, SITAPA berhasil meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, seperti sekolah, orang tua, turut mendukung keberhasilan program ini dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif.

Namun, agar efektivitas SITAPA semakin optimal, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat. Penguatan sosialisasi dan pendampingan kepada remaja juga perlu terus ditingkatkan agar mereka tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menaati dan menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hasil penelitian, sekolah SMA/SMK yang sudah dilakukan penyuluhan masih terlihat minim. Pengenalan kegiatan Sitapa Pendidikan dan juga upaya menangani pelanggaran peraturan daerah pada bidang Pendidikan belum dirasa optimal. Diperlukan pemerataan kegiatan penyuluhan Sitapa Pendidikan ini dalam beberapa sekolah SMA/SMK di Provinsi Jawa Timur serta operasi razia di beberapa daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bramanta, I. N. S., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.
- Diskominfo Provinsi Jawa Timur. (2024, November 21). *DPRD Setujui Raperda APBD Jatim 2025, Pj. Gubernur Adhy Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat*. Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Jawa Timur.
- Djidar, H., & Yasruddin. (2024). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Luwu Timur. *Journal Publicuho*, 7(4), 1813-1823. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.532>

- Hibatullah, M. (2023). Efektivitas Penertiban Anak Sekolah Bolos Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. <https://www.zenius.net/blog/materi-sosiologi-nilai-dan-norma-sosial>
- Indrawati, Y. V. (2023). Model Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Pada Program Operasi Kasih Sayang Penertiban Pelajar di Serdang Bedagai. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 8(2), 51-57. <https://doi.org/10.31289/simbolika.v8i2.6230>
- Pratomo, H. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Prefensi Hukum*.
- Rosidah. (2021). Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengatasikanakalan Pelajar Di Kabupaten Lampung Selatan. *Journal Dinamika*.
- Rudi, & Syukur, M. (2021). Implikasi Pelanggaran Lokasi Tempat Hiburan Malam Terhadap Perilaku Sosial Siswa Sma Negeri 16 Makassar. *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, 1(2), 2021-2032.
- Saraswati, M. N. (2023). Hubungan Antara Keterlibatan Siswa Dengan Kenakalan Remaja Pada Siswa Kelas Xi Di Sma Taruna Nusantara. *Jurnal EMPATI*, 12(1). <https://doi.org/10.14710/empati.2023.28820>
- Sari, W. P., & Muis, Dr. T. (2018). Studi Kasus Tentang Perilaku Membolos Siswa Di Sma Negeri 1 Plumpang Tuban. *Ejournal Unesa*.
- Soetarto, Ginting, M. P. B., & Munte, A. G. (2021). Peran Dan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo Dalam Pembinaan Dan Pencegahan Pelajar Yang Terjaring Operasi Kasih Sayang. *Jurnal Governance Opinion*.
- Yulia, Y., Rachmawati, I., & Mulyadi, A. (2019). Kinerja Satpol PP dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Sukabumi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 1(1), 19-29. <https://doi.org/10.31539/joppa.v1i1.802>